

DAMPAK BANTUAN SOSIAL NON TUNAI MELALUI E-MONEY TERHADAP PERLUASAN INKLUSI KEUANGAN DI ACEH

THE IMPACT OF NON-CASH SOCIAL ASSISTANCE THROUGH E- MONEY TO THE EXPANSION OF FINANCIAL INCLUSION IN ACEH

Nanda Ameliany

Universitas Malikussaleh
nanda.ameliany@unimal.ac.id

Sjafruddin

Universitas Malikussaleh
sjafruddin@unimal.ac.id

Sufi

Universitas Malikussaleh
sufi@unimal.ac.id

Lisa Iryani

Universitas Malikussaleh
lisa.iryani@unimal.ac.id

Indra Alhakim

Universitas Malikussaleh
indra.alhakim@unimal.ac.id

Ali Muhayatsyah

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
muhayatsyah@iainlhokseumawe.ac.id

Abstract

Broad access to formal financing for poor households through the distribution of social assistance with electronic money (e-money) is believed to accelerate poverty alleviation. The distribution of social assistance through the non-cash system is a breakthrough made by the government to increase aid effectiveness and promote financial inclusion. Recent research has shown that some beneficiaries find it challenging to disburse aid with the system. They only use non-cash facilities to disburse aid and do not want to use the system for other financial services. This fact can be an obstacle to achieving financial inclusion. This study aims to investigate what factors influence beneficiaries' perceptions of using the cashless system. We surveyed one hundred and fifty non-cash beneficiaries in districts/cities in Aceh. The distribution of non-cash social assistance is expected to familiarize the community with saving, it turns out that it is only limited to the disbursement of social assistance, and the mechanism for saving is not immediately carried out by the beneficiaries. Financial inclusion in non-social assistance for the poor is a pseudo-financial inclusiveness and has no impact on poverty reduction.

Keyword : *non-cash social assistance, financial inclusion, poverty*

Abstrak

Akses yang luas ke pembiayaan formal bagi rumah tangga miskin melalui distribusi bantuan sosial dengan uang elektronik (E-Money) diyakini dapat mempercepat pengentasan kemiskinan. Distribusi bantuan sosial melalui sistem non-tunai merupakan terobosan baru yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas bantuan dan mempromosikan inklusi keuangan. Penelitian terbaru menyatakan bahwa sejumlah penerima bantuan merasa kesulitan mencairkan bantuan dengan sistem tersebut. Mereka hanya menggunakan fasilitas non-tunai untuk mencairkan bantuan saja dan tidak ingin menggunakan sistem tersebut untuk layanan keuangan lainnya. Fakta tersebut dapat menjadi hambatan tercapainya inklusi keuangan. Studi ini bertujuan menyelidiki faktor-faktor apa saja yang memengaruhi persepsi penerima bantuan untuk menggunakan sistem non-tunai.

Kami melakukan survei pada 150 (seratus lima puluh) penerima bantuan non-tunai di Kabupaten/kota di Aceh. Penyaluran bantuan sosial non tunai diharapkan membiasakan masyarakat untuk menabung ternyata hanya sebatas pencairan bantuan sosial, mekanisme menabung tidak serta merta dilakukan oleh penerima manfaat. Inklusi keuangan pada bantuan sosial non untuk masyarakat miskin adalah inklusivitas keuangan semu dan tidak berdampak pada penanggulangan kemiskinan.

Kata kunci: bantuan sosial non-tunai, inklusi keuangan, kemiskinan

A. Pendahuluan

Beberapa tahun terakhir uang elektronik atau uang non tunai banyak digunakan sebagai alat transaksi keuangan. Selain swasta, pemerintah juga telah menggunakan sistem non tunai dalam berbagai pelayanan. Salah satu terobosan baru pemerintah adalah dengan mendistribusikan transfer ke program pengentasan kemiskinan. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 tanggal 12 Juli 2017, pemerintah secara resmi menyetujui penyaluran bansos non tunai. Peraturan tersebut menerapkan bantuan sosial non tunai pada program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Dibandingkan dengan negara lain seperti India, Bangladesh, Haiti, dan Filipina, Indonesia tergolong terlambat mengadopsi sistem ini.

Penyaluran bantuan non tunai diyakini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi bantuan. Bantuan sosial diharapkan dapat diterima oleh masyarakat yang tepat dengan jumlah yang tepat, kuantitas, tepat waktu dan kualitas yang baik. Melalui sistem ini bansos dikirim langsung ke rekening penerima melalui bank penyalur. Melalui lembaga keuangan digital (LKD), penerima bantuan dapat mencairkan atau menyimpan sebagian bantuannya. Rekening dapat diakses melalui kartu kombo yang merupakan alat pembayaran berfitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai bansos. Kartu ini dapat merekam data penerima dan

berfungsi sebagai tabungan atau dompet elektronik (e-wallet). LKD diharapkan dapat mendorong minat masyarakat untuk menabung. Bantuan non tunai dengan LKD telah membuka akses masyarakat miskin ke perbankan.

Penyaluran bansos dilakukan oleh bank-bank pemerintah yaitu Bank Mandiri dan Bank BRI. Bank Mandiri menyalurkan bantuan sosial senilai Rp 6,61 Triliun kepada 5,9 juta keluarga melalui skema Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dari jumlah tersebut, sebanyak 2,2 juta keluarga menerima bansos dengan skema PKH, sedangkan 3,7 juta penerima dengan skema BPNT. Penyaluran bantuan dilakukan kepada para agen keuangan Bank Mandiri (LKD). Saat ini Bank Mandiri memiliki lebih dari 126.806 agen keuangan yang terdiri dari 63 ribu agen perorangan dan 61 ribu loket badan hukum yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara Bank Rakyat Indonesia hingga akhir Desember 2021, Bank BRI telah menyalurkan bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp 11 triliun, bansos sembako reguler sebesar Rp 16,6 triliun, bansos sembako PPKM sebesar Rp 2,4 triliun, dan bansos penanganan kemiskinan ekstrem sebesar Rp 236,9 miliar pada Desember 2021.

Selain meningkatkan efektivitas, bantuan non tunai juga mendorong agenda inklusi keuangan. Melalui sistem, semua penerima dapat mengakses dan menggunakan layanan perbankan secara otomatis. Mereka dapat menarik dan menyimpan uang yang mereka terima. Namun, pemerintah menyarankan agar bantuan sosial tidak diambil semua. Mereka diharapkan untuk menyimpan sejumlah uang di rekening mereka. Melalui tabungan, uang dari bantuan sosial akan tumbuh dan penerima manfaat akan mendapatkan lebih banyak manfaat di masa depan.

B. Kerangka Teori

1. Bantuan Sosial Pemerintah

Indonesia sebagai negara di Asia Tenggara menghadapi masalah yang hampir sama dengan negara berkembang lainnya di dunia, yaitu kemiskinan dan pertumbuhan. Angka target tahun 2019 dalam RPJMN adalah penurunan angka kemiskinan menjadi hanya 5-6%. Ini bukan hanya tentang mengurangi kemiskinan, hal ini diharapkan akan menyebabkan peningkatan PDB per kapita dari \$3.500 pada tahun 2013 menjadi \$7.000 pada tahun 2019. Sebuah penelitian di negara berkembang di kawasan afrika

menunjukkan bukti bahwa transfer tunai dari pemerintah efektif dalam mengurangi kerentanan dan kemiskinan kronis, dan memiliki dampak positif yang lebih luas dalam rumah tangga penerima dan masyarakat (Vincent dan Cull, 2009).

Sebuah studi di negara-negara berkembang di kawasan Afrika menemukan bahwa subsidi tunai oleh pemerintah efektif dalam mengurangi kerentanan dan kemiskinan kronis, serta berdampak positif terhadap kemiskinan, dan memiliki jangkauan besar bagi rumah tangga penerima manfaat dan masyarakat (Vincent dan Cull, 2009).

Di Indonesia, dalam hal syarat seseorang untuk menikmati tunjangan sosial, tunjangan sosial diklasifikasikan menjadi dua jenis: Tunjangan Tunai Bersyarat (TTB) dan Tunjangan Tunai Tanpa Syarat (TTTS). Secara garis besar, TTB adalah suatu kondisi dimana seseorang akan menerima bantuan sosial dari pemerintah jika memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, seperti program Keluarga Harapan. Di sisi lain, TTTS dikeluarkan pemerintah karena dipicu oleh kondisi eksternal. Salah satu contohnya adalah Program Tabungan Keluarga Sejahtera (PSKS). PSKS hadir sebagai dampak dari kenaikan harga BBM dunia selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, pemerintah tidak ingin harga BBM dunia yang tinggi mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin. Saat itu, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan kepada hampir 15,5 juta rumah tangga sasaran.

2. Keuangan Inklusif

Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) mendefinisikan keuangan inklusif sebagai keadaan dimana rumah tangga dan entitas bisnis mempunyai akses atas jasa keuangan yang efektif dan sesuai. Jasa keuangan tersebut harus mempunyai sifat yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan diatur dengan baik. Yang dimaksud dengan akses yang efektif adalah kenyamanan layanan dengan biaya yang terjangkau oleh para penggunaannya dengan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha dari para penyedia layanan. Sebagai contoh keberlangsungan disini adalah jangan sampai biaya jasa perbankan ditekan semaksimal mungkin dalam rangka menyediakan layanan jasa keuangan yang terjangkau akan tetapi di sisi lain akan merugikan perbankan dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk memastikan layanan tetap berjalan ternyata lebih tinggi. Jadi harus dipahami bahwa perbankan adalah tetap merupakan entitas

bisnis yang mencari keuntungan. Keuangan inklusif dikatakan sukses apabila masyarakat penggunaan layanan jasa keuangan formal lebih banyak daripada masyarakat yang menggunakan layanan jasa keuangan informal.

Consultative Group on Assistance for the Poor (CGAP) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai situasi di mana rumah tangga dan bisnis memiliki akses ke layanan keuangan yang tepat dan efektif. Layanan keuangan ini harus bertanggung jawab, berkelanjutan, dan diatur dengan baik. Yang kami maksud dengan akses yang efisien adalah kenyamanan layanan dengan biaya yang terjangkau bagi pengguna dengan tetap mempertimbangkan kelangsungan operasi penyedia layanan. Sebagai contoh keberlanjutan di sini, jangan sampai biaya layanan perbankan ditekan semaksimal mungkin demi memberikan layanan keuangan yang terjangkau. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa bank tetap merupakan entitas komersial yang mencari keuntungan. Inklusi keuangan dianggap berhasil jika masyarakat yang menggunakan jasa keuangan formal lebih banyak dibandingkan dengan yang menggunakan jasa keuangan informal.

Reserve Bank of India (RBI) mendefinisikan dengan sedikit berbeda. Dr. Chakrabarty, Deputy Gubernur RBI, mengatakan pada tahun 2011 bahwa inklusi keuangan adalah proses memastikan akses ke produk dan layanan yang dibutuhkan oleh kelompok rentan seperti kelompok berpenghasilan rendah untuk mendapatkan layanan yang mereka butuhkan, dan cara transparan. India percaya bahwa inklusi keuangan sangat penting bagi India dalam ambisinya untuk menjadi pemain global. Akses ke keuangan akan menarik pemain pasar global, yang mengarah pada peningkatan kesempatan kerja dan bisnis. Pertumbuhan inklusif akan berperan sebagai sumber pemberdayaan dan memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih efektif dalam proses ekonomi dan sosial.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, inklusi keuangan dikatakan sebagai upaya pemerintah untuk menyediakan produk dan layanan keuangan yang berkualitas, terjangkau, dan terjamin kepada seluruh lapisan masyarakat. Namun, ada sejumlah alasan mengapa orang tidak memanfaatkan produk dan layanan keuangan. Bank Indonesia menyebutkan setidaknya ada dua alasan mengapa sebagian masyarakat tidak memanfaatkan produk dan jasa keuangan, yakni kendala sisi penawaran dan sisi permintaan. Keterbatasan yang dimaksud adalah karena hambatan tarif (mahal), hambatan informasi (tidak diketahui), hambatan desain produk (produk yang sesuai)

dan hambatan saluran (fasilitas yang sesuai). Inklusi keuangan dapat mengatasi hal tersebut dengan memberikan berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat, regulator, pemerintah maupun pihak swasta. Manfaat tersebut antara lain meningkatkan efisiensi ekonomi, mendukung stabilitas sistem keuangan, mengurangi *shadow banking* atau keuangan yang tidak bertanggung jawab, mendukung pengembangan pasar keuangan secara luas, menyediakan potensi pasar baru bagi perbankan, mendukung peningkatan *Human Development Index of Indonesia* (HDI), membuat positif kontribusi terhadap perekonomian daerah dan nasional. pertumbuhan, keberlanjutan dan pengurangan ketimpangan serta kekakuan perangkat pendapatan rendah. Berdasarkan alasan tersebut, Bank Indonesia meyakini bahwa inklusi keuangan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

3. Bantuan Sosial Non-Tunai

Samson (2009) berpendapat bahwa distribusi bantuan tunai lebih dipahami daripada bantuan dalam bentuk barang. Beberapa alasannya adalah kemungkinan korupsi lebih mudah dimitigasi karena bantuan tunai lebih mudah diaudit daripada bantuan natura seperti makanan. Meski dalam beberapa kasus bantuan sosial dalam bentuk natura masih diutamakan, setidaknya dalam jangka pendek.

Terdapat beberapa kelemahan transfer secara tunai. Salah satu nya adalah bahwa seseorang yang akan menerima uang tunai akan diharapkan untuk berkumpul di suatu tempat, misalnya balai desa, untuk kemudian dibagikan dana tersebut. Metode transfer secara non tunai diharapkan mengubah cara tersebut dimana seseorang “ditarik” ke suatu tempat untuk menerima dana dan diharapkan di masa depan dana tersebut “didorong” langsung kepada penerima (*Bankable Frontier Associates*, 2006).

Selain itu, penyaluran bantuan berupa uang juga dirasa mahal karena alasan yang sama dengan metode sebelumnya, yaitu rawan korupsi dan mahal dalam distribusi uangnya. Namun demikian, dimasa kini juga dihami bahwa diperlukan suatu inovasi atas penyaluran bantuan melalui uang tunai. Transfer tunai memiliki beberapa kelemahan. Pertama, siapa pun yang menerima uang harus berkumpul di satu tempat, seperti balai desa, dan kemudian membagikan uang itu. Pengiriman uang tanpa uang tunai diharapkan mengubah cara seseorang “ditarik” ke suatu tempat untuk menerima

uang dan diharapkan di masa depan uang akan “didorong” langsung ke penerima (Bankable Frontier Associates, 2006).

Selain itu, penyaluran bantuan dalam bentuk uang tunai juga dinilai mahal karena alasan yang sama dengan cara sebelumnya, yaitu rawan korupsi dan mahal dalam penyaluran uang tunai. Namun, saat ini juga dipahami bahwa inovasi diperlukan untuk memberikan bantuan tunai. Porteous (2008) dalam Samson (2009) juga menyatakan bahwa inovasi dalam sistem bantuan tunai akan menciptakan lebih banyak peluang pengembangan bagi penerima kesejahteraan sosial, memperluas akses ke layanan keuangan, dan kehidupan yang lebih baik. Dalam studi “*Supporting the Poor Through G2P Payments*” (Pickens, Porteous and Rotman, 2009), juga disebutkan bahwa distribusi manfaat sosial non-moneter akan mengurangi biaya distribusi yang ditanggung pemerintah. untuk orang-orang. penerima. pihak pendukung. Bank sebagai distributor juga diuntungkan, karena distribusi melalui rekening bank merupakan titik awal untuk mengakses keuangan formal lainnya seperti tabungan, kredit atau asuransi.

C. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mewawancarai secara acak 150 responden penerima PKH dengan program e-money pada tahun 2021 dan 2022. Responden tersebar di tiga wilayah, 50 orang di Kabupaten Bireuen, 50 orang di Kabupaten Aceh Utara, dan 50 orang di Kota Lhokseumawe. Untuk menganalisis persepsi responden terhadap kemudahan sistem non tunai terhadap 3 (tiga) aspek yaitu akses, karakteristik dan sosialisasi, penelitian kami menyajikan analisis deskriptif yang ditunjukkan dalam tabulasi silang dan grafik histogram. Kami akan membandingkan kondisi di ketiga wilayah survei.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif. Untuk mengetahui pengaruh akses, karakteristik dan sosialisasi terhadap niat penerima manfaat dalam menggunakan sistem non tunai, digunakan model regresi probit. Penerima manfaat cenderung menggunakan sistem non tunai jika mereka merasa sistem tersebut mudah diakses. Sebaliknya jika mereka merasa sulit untuk mengakses maka mereka enggan untuk mengadopsi sistem tersebut. Sistem ini mudah

diakses jika jarak ke LKD (lembaga keuangan digital) dekat, waktu tempuh ke LKD pendek, biaya transportasi rendah dan waktu antrian singkat.

Kami menggunakan model regresi probit untuk memperkirakan pengaruh akses, karakteristik dan sosialisasi terhadap persepsi penggunaan sistem non tunai :

$$D = \beta_1 + \beta_2 * Access + \beta_3 * characteristic + \beta_4 * socialization + e$$

Variabel terikat, D adalah variabel kategoris dimana 1 responden merasa sistem non tunai mudah, 0 lainnya. Variabel dependen D merupakan variabel kategoris dimana nilai 1 berarti responden merasa pencairan transfernya mudah, 0 lainnya. Pada model probit p adalah probabilitas responden merasa bahwa pencairan dana transfer mudah. Semakin besar nilai p maka semakin besar kemungkinan responden merasa pencairan transfernya mudah dan semakin besar kemungkinan menggunakan sistem non tunai untuk transaksi keuangan (tabungan), daripada hanya mengambil semua transfer untuk dikonsumsi. Variabel bebas terdiri dari variabel akses, karakteristik responden, dan sosialisasi.

3. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi perlu dilakukan pengolahan data. Variabel akses diturunkan menjadi beberapa variable:

a) Jarak ke LKD

H_a: Jarak ke LKD berpengaruh signifikan terhadap probabilitas responden menggunakan sistem non tunai. Semakin dekat jarak maka semakin mudah penerima untuk mencairkan transfer dan semakin besar kemungkinan responden untuk menggunakan sistem non tunai.

b) Waktu tempuh ke LKD

H_a: Waktu tempuh ke LKD berpengaruh signifikan terhadap probabilitas responden menggunakan sistem non tunai. Semakin lama waktu LKD semakin sulit akses sistem non tunai sehingga diharapkan semakin rendah kemungkinan responden untuk menggunakan sistem non tunai.

c) Waktu tunggu di loket LKD

H_a: Waktu tunggu LKD berpengaruh signifikan terhadap probabilitas responden menggunakan sistem non tunai. Semakin lama waktu antrian di loket LKD semakin sulit untuk mengakses sistem non tunai sehingga diharapkan semakin kecil kemungkinan responden untuk menggunakan sistem non tunai.

d) Biaya transportasi ke LKD

H_a: Biaya transportasi berpengaruh signifikan terhadap probabilitas responden menggunakan sistem non tunai. Semakin mahal biaya transportasi, LKD semakin sulit mengakses sistem non tunai sehingga diharapkan semakin kecil kemungkinan responden untuk menggunakan sistem non tunai.

Sedangkan Variabel Karakteristik Responden diturunkan menjadi:

a) Usia

H_a: Usia responden berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan responden menggunakan sistem non tunai. Semakin muda responden maka semakin tinggi niat untuk menggunakan sistem non tunai dan semakin tinggi kemungkinan responden untuk menggunakan sistem non tunai. Anak muda dianggap lebih mudah mengadopsi teknologi.

b) Pendidikan terakhir

H_a: Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap probabilitas responden menggunakan sistem non tunai. Semakin berpendidikan semakin besar kemungkinan responden untuk menggunakan sistem non tunai.

c) Wilayah

H₀: Wilayah berpengaruh signifikan terhadap probabilitas responden menggunakan sistem non tunai. Terdapat perbedaan antar wilayah mengenai kemungkinan responden menggunakan sistem non tunai.

Variabel Sosialisasi diturunkan menjadi variabel:

a) Jumlah sosialisasi

Ha: Jumlah sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan responden menggunakan sistem non tunai. Semakin banyak sosialisasi yang diberikan kepada responden maka semakin baik pengetahuan responden mengenai sistem non tunai dan semakin besar kemungkinan menggunakan sistem non tunai

D. Hasil Penelitian dan Diskusi

1) Persepsi Penerima Manfaat Tentang Adopsi Bansos Non-Tunai

a. Penyaluran Non-Tunai Mudah dan Bervariasi Antar Daerah

Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan bahwa mayoritas responden di ketiga wilayah (66,83%) menyatakan bahwa sistem non tunai mudah digunakan. Sebanyak 42 responden di kota Lhokseumawe, 35 responden di kabupaten Bireuen, dan 22 responden di Aceh Utara menyatakan bahwa sistem non tunai mudah digunakan. Temuan empiris lainnya menunjukkan bahwa persepsi antara ketiga wilayah tersebut cenderung berbeda. Mayoritas responden di Kota Lhokseumawe (77,22%) dan Kabupaten Bireuen (72%) mengatakan sistem itu mudah sedangkan kabupaten Aceh Utara hanya 48,75 % yang menganggap sistem itu mudah untuk digunakan. Masih banyak responden yang menyatakan bahwa sistem non tunai itu sulit. Ini lebih dari 50%.

b. Tingkat Pendidikan Cenderung Tidak Berkorelasi Dengan Persepsi Sistem Non-Tunai

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditanyakan, data menunjukkan bahwa sebagian besar penerima adalah berpendidikan rendah-menengah. Di Kabupaten Bireuen terdapat lebih dari 70% responden yang tamat SD dan sekitar 16,67% responden tamat SMP dan hanya 6% responden yang tamat SMA. Di Kabupaten Aceh Utara responden yang tamat SD lebih dari 80%, SLTP dan SLTA masing-masing 2,5% dan responden yang tidak sekolah 5%. Adapun tingkat pendidikan responden di Kota Lhokseumawe lebih 60% tamat SD dan sekitar 32% % responden tamat SMP dan hanya 8% responden yang tamat SMA.

Hasil survei menunjukkan bahwa lebih dari 80 % penerima manfaat yang merasa sistem non tunai itu mudah telah menyelesaikan sekolah dasar. Sedangkan mereka yang merasa sistem non tunai sulit 78% telah menyelesaikan sekolah dasar. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan cenderung tidak berkorelasi dengan persepsi penerima manfaat sistem non-tunai.

c. Usia Responden yang Merasa Sistem Non-Tunai Mudah digunakan Rata-Rata Berusia Kurang dari 40 Tahun

Jika dilihat dari segi usia, di Kabupaten Bireuen, responden yang berusia 40 tahun lebih cenderung menganggap bahwa sistem non tunai lebih sulit dibandingkan dengan mereka yang berusia 39 tahun. Namun di Kabupaten Aceh Utara, usia tidak berbeda secara signifikan antara responden yang merasakan sistem non tunai mudah dan sulit. Mereka yang merasa sistem non tunai mudah berusia 43 tahun sedangkan yang merasa sulit berusia 45 tahun. Begitu juga, tidak jauh berbeda dengan di Kota Lhokseumawe, responden yang berusia kurang dari 40 tahun merasa lebih mudah menggunakan sistem non-tunai.

d. Jarak Ke Lembaga Keuangan Digital (LKD) Cenderung Mempengaruhi Persepsi Non tunai di Semua Wilayah Wilayah

Dalam hal jarak, terlihat adanya pola antara persepsi sistem non tunai dan jarak terhadap LKD di Kabupaten Aceh Utara. Responden yang harus menempuh jarak yang lebih jauh ke LKD merasa sistem non tunai lebih sulit. Jarak tempuh rata-rata mereka sekitar 6 km. Sedangkan jarak ke LKD bagi responden yang merasa sistem non tunai mudah hanya sekitar 2 km. Namun di Kota Lhokseumawe responden yang menyatakan sulit dan mudah non tunai harus menempuh perjalanan dengan jarak yang hampir sama (kurang dari 2 km). Hal ini menunjukkan bahwa di Kota Lhokseumawe tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai jarak ke LKD bagi mereka yang merasa sistem non tunai mudah dan sulit.

e. Waktu Tempuh Cenderung Mempengaruhi Persepsi Non tunai di Ketiga Wilayah Tersebut

Untuk alokasi waktu yang harus dihabiskan menunjukkan bahwa penerima manfaat yang harus ke LKD dengan waktu tempuh yang lebih lama cenderung kesulitan menggunakan sistem non tunai. Di Aceh Utara yang kesulitan menggunakan sistem non-tunai rata-rata menghabiskan waktu lebih dari 30 menit untuk LKD. Sedangkan yang merasa mudah hanya menghabiskan rata-rata 15 menit. Di Kabupaten Bireuen mereka yang menganggap sistem non tunai sulit harus menghabiskan waktu lebih lama 15 menit daripada mereka yang menganggap mudah 10 menit.

f. Biaya Transportasi Cenderung Berkorelasi Dengan Persepsi Responden Terhadap Sistem Non tunai Di Kabupaten Aceh Utara

Dalam hal biaya transportasi menunjukkan bahwa di Aceh Utara, mereka yang mengeluarkan biaya transportasi lebih mahal ke LKD merasa sulit untuk menggunakan sistem non tunai. Mereka harus merogoh kocek sekitar Rp 25.000 untuk transportasi. Di sisi lain mereka yang menganggap sistem non tunai mudah hanya menghabiskan rata-rata Rp 12.000. Di kota Lhokseumawe, biaya transportasi relatif kecil, yaitu sekitar Rp 8.000. Berdasarkan data tabulasi silang diharapkan ada perbedaan persepsi yang signifikan terkait biaya transportasi.

g. Waktu Antrian Cenderung Mempengaruhi Persepsi Sistem Non Tunai Di Kabupaten Bireuen

Respon mengenai waktu antrian menunjukkan bahwa di Kabupaten Bireuen penerima manfaat yang menghabiskan waktu lebih lama untuk mengantri di LKD cenderung merasa sistem non tunai sulit. Ada temuan menarik di Kabupten Aceh Utara. Mereka yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengantri merasa sistem non tunai itu mudah. Demikian pula mereka yang dilayani lebih cepat menganggap sistem non tunai sulit.

h. Jumlah Sosialisasi Cenderung Tidak Mempengaruhi Persepsi Non-Tunai

Faktor sosialisasi menunjukkan bahwa rata-rata responden di kabupaten Bireuen mendapatkan sosialisasi lebih dari 1 kali. Sebanyak 45% responden menganggap sistem non tunai itu mudah dan 55% lainnya merasa sulit. Temuan ini menunjukkan bahwa di Bireuen banyaknya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah belum terbukti mengurangi persepsi responden bahwa sistem non tunai itu sulit. Temuan menarik lainnya di Aceh Utara dimana semakin banyak sosialisasi diberikan semakin banyak responden yang menganggap sistem non-tarif itu sulit. Temuan empiris tersebut mungkin karena metode atau materi sosialisasi yang tidak tepat.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Responden Terhadap Sistem Non-Tunai

Hasil analisis regresi probit yang menganalisis perilaku responden secara keseluruhan. Secara umum pengaruh akses, karakteristik, dan sosialisasi terhadap persepsi non tunai konsisten dengan hipotesis nol. Namun demikian beberapa efek dari variabel independen tidak signifikan secara statistik. Jarak, biaya dan waktu antrian berpengaruh signifikan terhadap persepsi sistem non tunai.

Hasil regresi menunjukkan bahwa responden yang lebih tua cenderung percaya bahwa sistem non tunai lebih mudah. jika umur responden bertambah 1 tahun maka persepsi akan bertambah 0,004. Namun, data tersebut tidak cukup mendukung signifikansi variabel-variabel tersebut. Mungkin karena hampir semua penerima manfaat berusia di atas 40 tahun.

Persepsi sistem non-tunai berbeda secara signifikan antara sekolah dan non-sekolah. Responden non-sekolah merasa bahwa sistem non tunai sulit. Jika responden tidak sekolah maka persepsi akan turun 0,5. Jika responden telah menyelesaikan sekolah dasar maka probabilitas sistem non tunai mudah akan berkurang 0,097. Namun, tidak ada perbedaan persepsi yang signifikan antara responden yang telah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Sebagian responden dengan pendidikan dasar merasa sistem non tunai itu mudah dan sebagian lainnya merasa kesulitan.

Persepsi sistem non tunai juga berbeda secara signifikan antara wilayah urban dan rural. Responden di urban merasa bahwa sistem non tunai lebih mudah daripada rural. persepsi tentang Responden urban yang menganggap transfer non tunai lebih mudah 0,44 lebih tinggi dibandingkan responden di rural.

Hasil regresi juga menunjukkan bahwa akses ke LKD mempengaruhi persepsi responden terhadap sistem non tunai. Semakin sulit mengakses LKD semakin rendah persepsi responden terhadap sistem non tunai. Dari 4 (empat) variabel akses hanya 3 yang signifikan yaitu variabel waktu tempuh, biaya transportasi ke LKD dan waktu antrian di LKD. Jarak ke LKD berhubungan negatif dengan persepsi responden. Jika jarak ke sekolah cukup jauh maka persepsi responden cenderung lebih rendah. Jika jarak ke LKD bertambah 1 km maka persepsi akan berkurang 0,0000030. Namun demikian, data tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa variabel-variabel tersebut signifikan secara statistik.

Tabel 1
Probit Regression Output

Independent Variables	Coefficient	Dy/dx
Characteristics		
Age	0,0166	0,004112
Basic school 1=SD/SMP;0=others	-0,3928	-0,097405
No school, 1=no education; 0=other	-2,0425*	-0,506489
Urban, 1=Urban ; 0=Rural	1,7823***	0,441974
Access to LKD		
Distance	-0,000014	-0,000003
Time to go	-0,0390*	-0,009659
Traveling Cost	-0,0001**	-0,000018
Queue time	-0,0064*	-0,001584
Number of socialization	0,1078	0,02672
Constant	0,2394	

Significant level : * 0,1; **0,05; ***0,001; Prob > chi2 = 0.0000;
Pseudo R2=0.3487; Number obs = 150

Biaya transportasi berpengaruh signifikan terhadap persepsi sistem non tunai. Semakin besar biaya untuk LKD semakin rendah persepsi penerima manfaat. Kenaikan biaya perjalanan Rp1 ke LKD akan menurunkan persepsi penerima manfaat sebesar 0,000018. Waktu secara signifikan mempengaruhi persepsi penerima manfaat. Semakin lama waktu pencairan transfer semakin rendah persepsi penerima bantuan. Jika waktu tempuh ke LKD meningkat maka persepsi akan berkurang 0,0096. Waktu antrian juga

berpengaruh signifikan terhadap persepsi sistem non tunai. Responden yang harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengantri cenderung merasa sistem non tunai itu sulit. Peningkatan waktu antrian 1 (satu) menit akan menurunkan persepsi penerima manfaat sebesar 0,0015.

Hubungan antara jumlah sosialisasi dan persepsi adalah positif. Jika jumlah sosialisasi meningkat maka persepsi penerima manfaat akan meningkat 0,026. Namun, data tersebut tidak cukup mendukung bahwa variabel tersebut signifikan secara statistik. Hal tersebut ditenggarai karena penerima manfaat membutuhkan lebih banyak sosialisasi metode yang tepat untuk memiliki persepsi yang lebih baik dari sistem non tunai.

E. Kesimpulan

Penerima manfaat seharusnya akan memiliki persepsi positif tentang sistem non tunai. Jika mereka merasa lebih mudah maka mereka akan cenderung menggunakan sistem non tunai untuk transaksi keuangan. Untuk mendorong penerima manfaat menggunakan sistem non tunai dalam jangka panjang, pemerintah perlu meningkatkan akses penyaluran bantuan. Pemerintah perlu mempersingkat waktu tempuh, menurunkan biaya transportasi, dan mempersingkat waktu antrean. Edukasi diperlukan untuk meningkatkan literasi keuangan terutama bagi responden yang belum pernah sekolah. Sosialisasi mengenai manfaat dan fasilitas keuangan yang melekat pada sistem non tunai harus diberikan secara intensif dengan cara yang mudah dipahami oleh responden yang berpendidikan rendah. Sosialisasi secara intensif dan menggunakan metode yang efektif harus dilakukan di daerah-daerah di mana mayoritas penerima manfaat merasa bahwa sistem non tunai sulit.

Daftar Pustaka

- Alao, A. A., & Sorinola, O. O. (2015). Cashless policy and customers' satisfaction: A study of commercial banks in Ogun State, Nigeria. *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(2), 37–47.
- Ariguzo, G. C., & White, D. S. (2013). Exploring demographic differences in the adoption of mobile money: M-PESA in Kenya. *International Journal of Electronic Marketing and Retailing*, 5(4), 340–358.
- Auta, E. M. (2010). E-banking in developing economy: Empirical evidence from Nigeria. *Journal of Applied Quantitative Methods*, 5(2).
- Ayoola, T. (2013). The effect of cashless policy of government on corruption in Nigeria. *International Review of Management and Business Research*, 2(3).
- Cook, S., & Pincus, J. (2014). Poverty, inequality and social protection in Southeast Asia: An Introduction. *Journal of Southeast Asian Economies*, 1–17.
- Djamaluddin, S., Hidayanto, A. N., & Wardhani, S. (2016). Perception of beneficiaries towards adoption of e-money in the distribution of social assistance in Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 13–24.
- Etim, A. S. (2014). Mobile banking and mobile money adoption for financial inclusion. *Research in Business and Economics Journal*, 9, 1.
- Fonchamnyo, D. C. (2013). Customers' perception of e-banking adoption in Cameroon: an empirical assessment of an extended TAM. *International Journal of Economics and Finance*, 5(1), 166–176.
- Hidayanto, A. N., Hidayat, L. S., Sandhyaduhita, P. I., & Handayani, P. W. (2015). Examining the relationship of payment system characteristics and behavioural intention in e-payment adoption: a case of Indonesia. *International Journal of Business Information Systems*, 19(1), 58–86.
- Irmawati, S., Damelia, D., & Puspita, D. W. (2013). Model inklusi keuangan pada UMKM berbasis pedesaan. *JEJAK*, 6(2).
- Jonathan, C., Erlanda, R., & Hidayat, Z. A. (2015). The Influence Of Bank Product Socialization And Electronic Payment System Quality On Intention To Use E-Money In Indonesia. *International Multidiciplinary Conference on Social Sciences (IMCoSS)*, 1, 46.
- Lee, E.-J., & Lee, J. (2000). Haven't adopted electronic financial services yet? The acceptance and diffusion of electronic banking technologies. *Journal of Financial Counseling and Planning*, 11(1), 49.

- Long, G. T. (2012). Delivering social protection to the poor and vulnerable groups in Vietnam: Challenges and the role of the government. *ASEAN Economic Bulletin*, 245–258.
- Owusu-Dankwa, I., Appiah, E. E., & Mawutor, G. (2014). Customer perception and usage of e-paymnet in Ghana. *Journal of Contemporary Integrative Idea*, 2(2).
- Sarma, M. (2016). Measuring financial inclusion for Asian economies. *Financial Inclusion in Asia: Issues and Policy Concerns*, 3–34.
- Singh, S. (1999). Electronic money: understanding its use to increase the effectiveness of policy. *Telecommunications Policy*, 23(10–11), 753–773.
- Ummah, B. B., Nuryartono, N., & Anggraeni, L. (2015). Analisis inklusi keuangan dan pemerataan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 4(1), 1–27.
- Yaqub, J. O., Bello, H. T., Adenuga, I. A., & Ogundeji, M. O. (2013). The cashless policy in Nigeria: prospects and challenges. *International Journal of Humanities and Social Science*, 3(3), 200–212.
- Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2021 <https://pkh.kemensos.go.id/dokumen/DOCS20210520053509.pdf>
- Sebaran KPM dan bantuan PKH di Indonesia samapai dengan 2021
<https://pkh.kemensos.go.id/?pg=dashome>